

BAB II

PERKEMBANGAN INDUSTRI KARET ALAM DI INDONESIA DAN SEJARAH TERBENTUKNYA ITRC (INTERNATIONAL TRIPARTITE RUBBER COUNCIL)

Bab ini akan menyajikan dan memaparkan tentang perkembangan komoditas karet serta awal mula terbentuknya International Tripartite Rubber Council sebagai organisasi yang mewadahi tiga negara produsen karet terbesar dunia (Thailand, Malaysia, dan Indonesia) yang bertujuan untuk menjaga kestabilan harga karet dunia serta menjaga keseimbangan *supply-demand* karet alam. Adapun dalam bab ini akan dibagi menjadi beberapa sub bab yang secara garis besar akan memaparkan data tentang sejarah dan perkembangan industri karet alam di Indonesia kemudian diikuti dengan data tentang sejarah terbentuknya ITRC.

2.1 Sejarah Perkebunan Karet di Indonesia

Karet alam adalah karet yang dihasilkan dari tanaman getah dengan cara dilukai. Tanaman karet di perkebunan konvensional Indonesia adalah tanaman liar yang berasal dari hutan-hutan tropis yang tumbuh subur di sepanjang aliran sungai Amazon-Brasil yang kemudian dibudidayakan di Indonesia karena nilai ekonomisnya sehingga dibawa masuk ke Indonesia oleh Belanda pada masa kolonial. Awalnya karet alam ditanam di kebun raya Bogor sebagai koleksi yang kemudian pada tahun 1864 mulai dikenalkan di Indonesia. Tahun 1902 karet

alam dengan jenis karet Hevea (*Hevea Brasiliensis*) mulai ditanam secara massal di daerah Sumatra timur dan ditanam di pulau jawa pada tahun 1906. Indonesia menjadi penghasil karet alam terbesar dunia pada masa sebelum perang dunia ke II hingga tahun 1956 karena sebagian besar kebutuhan karet alam dunia pada waktu itu dipasok oleh Indonesia.¹⁸

Alasan lain yang memperkuat masuknya komoditas karet di Indonesia adalah ketidakstabilan ekonomi yang dirasakan oleh perusahaan komoditas perkebunan lain milik Belanda seperti perkebunan teh dan perkebunan kopi. Sehingga melihat potensi ekonomi yang ada pada tanaman karet menjadi solusi bagi pemerintah Belanda. Sebelum masuk ke Indonesia karet alam sudah mulai dikembangkan terlebih dahulu di Malaysia dan di Srilangka kemudian dikembangkan pembudidayaannya di Indonesia yang diawali di Sumatera pada tahun 1902 dan empat tahun kemudian mulai dikembangkan secara konvensional di pulau jawa pada tahun 1906.¹⁹

Penanaman karet secara tradisional dilakukan pada tahun 1980 di beberapa wilayah Sumatra Selatan terutama di daerah pedesaan yang memiliki ketersediaan lahan yang luas, belum terdapat proyek pengembangan karet, dan keterbatasan pengetahuan petani. Hingga pada tahun 1990 penanaman karet terus berkembang

¹⁸ Sejarah Singkat Karet Alam, Gambaran Umum Karet Alam Indonesia, hal. 43, diakses dalam <https://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/57265/10/BAB%20IV%20GAMBARAN%20UMUM%20KARET%20ALAM%20INDONESIA.pdf> (16/12/2019, 20:20 WIB)

¹⁹ Sofiani, Iqrima Hana, Ulfiak, dkk. *Rubber Tree (Hevea Brasiliensis) Cultivation In Indonesia and Its Economic Study*, Munich Personal Repec Archive, 2018, hal. 4 diakses dalam https://mpira.ub.uni-muenchen.de/90336/1/MPRA_paper_90336.pdf (13/07/2020, 18:30 WIB)

pesat sejalan dengan perkembangan penanaman kelapa sawit, karena sebagian kebun petani dikonversikan dengan kelapa sawit.²⁰

Pada tahun 1977 pemerintah Indonesia melakukan empat pola kebijakan pengembangan perkebunan karet yaitu: (1) Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR), (2) Pola Unit Pelaksanaan Proyek (UPP), (3) Pola Bantuan Parsial, dan (4) Pola Pengembangan Perkebunan Besar (PPB).²¹

Pertama, pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR) adalah pola pengembangan perkebunan dengan memanfaatkan kapasitas perusahaan perkebunan berskala besar untuk membantu pengembangan perkebunan rakyat disekitarnya.²² Perusahaan besar berperan sebagai inti dan perkebunan rakyat sebagai plasma. Setelah kebun plasma mengalami panen, perusahaan inti ikut serta dalam pengolahan dan pemasaran. PIR berusaha menciptakan petani mandiri yang ditujukan kepada kelompok masyarakat lokal dan pendatang yang berminat menjadi petani karet di wilayah bukaan baru. Petani diberikan kemudahan dengan sistem kredit dalam pembangunan. Sebelum karet produktif petani sebagai pekerja buruh plasma yang di upah.

Pemerintah dalam membangun perkebunan karet melalui PIR membentuk 3 program yakni PIR Berbantuan, PIR Swadana, dan PIR Transmigasi di

²⁰ Undang Fadjar, *Kemitran usaha perkebunan: Perubahan struktur yang belum lengkap*, Lembaga riset perkebunan Indonesia, diakses dalam <https://media.neliti.com/media/publications/70323-ID-kemitraan-usaha-perkebunan-perubahan-str.pdf> (12/07/2020, 23:00 WIB)

²¹ Mudjiati, Institut Pertanian Bogor, diakses dalam <http://repository.sb.ipb.ac.id/740/4/2-04-Mudjiati-Pendahuluan.pdf> (13/07/2020, 21.00 WIB).

²² Ermanto Fahamsyah, *Mekanisme Hukum dalam Pola Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan*, Universitas Jember, Jember, 2017, Vol. 2 no.1, diakses dalam <https://media.neliti.com/media/publications/89923-ID-mekanisme-hukum-dalam-pola-perusahaan-in.pdf> (13/07/2020, 21.40 WIB)

Indonesia.²³ Hingga pada tahun 1991 pemerintah berhasil mengelola kebun seluas 255.000 ha, di Sumatera Selatan seluas 159.261 ha dengan jumlah petani sebanyak 79.631 kepala keluarga. Namun program PIR ini mengalami kendala akibat ketidakmampuan petani melunasi kreditnya, penjualan bahan olahan karet keluar inti, mutu yang rendah, serta eksploitasi tanaman karet yang berlebihan. Sehingga pada tahun 1991 pemerintah tidak lagi mengembangkan perkebunan karet melalui PIR karena tidak efektif.²⁴

Kedua, Pola Unit Pelaksanaan Proyek (UPP) merupakan pengembangan perkebunan yang dilaksanakan di wilayah usaha petani karet yang telah ada, akantetapi petani tidak memiliki modal untuk membangun kebun. Pada tahun 1991 pemerintah pusat berhasil mengembangkan perkebunan karet di Indonesia seluas 441.736 ha. Melalui proyek UPP, proyek rehabilitasi, dan Peremajaan Tanaman Ekspor (PRPTE) sebanyak 69%, dan *Smallholder Rubber Project* (SRDP) sebanyak 31%. Khusus wilayah Sumatera Selatan seluas 98.741 ha dengan jumlah petani sebanyak 98.741 kepala keluarga.²⁵

Melalui pola UPP PRPTE dilaksanakan dengan prinsip petani mengelola sendiri sedangkan pihak UPP melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pembinaan. Akantetapi, program UPP PRPTE ini kurang efektif yang dikarenakan masih rendahnya minat dan pengetahuan petani akan bibit unggul, sarana transportasi yang tidak memadai dan pendanaan yang belum mencapai target sasaran.

²³ *Ibid.*, hal. 101

²⁴ Arif Dzulkifli Nasution, *Evaluasi Penerapan Inti Plasma Pada perkebunan kelapa sawit*, diakses dalam <https://bangazul.com/evaluasi-penerapan-inti-plasma-pada-perkebunan-kelapa-sawit/> (13/07/2020, 21:15 WIB)

²⁵ *Ibid.*,

Sedangkan untuk Pola UPP SRDP dilaksanakan dengan prinsip petani mengelola sendiri mulai dari pembangunan kebun sedangkan pihak UPP memberikan bimbingan dan penyuluhan secara berkelompok dengan hamparan 20 ha dan paket kredit saprodi termasuk upah tenaga kerja.²⁶

Prinsip yang dilaksanakan pada Pola *Sector Crops Development Project* (SCDP) tidak jauh berbeda dengan SRDP, hanya saja lokasinya diarahkan di daerah transmigrasi umum yang potensial karet. Pembiayaan pengembangan karet diambil dari proyek *Tree Crops Smallholder Development Project* (TCSDP). Strategi pengembangan kebun karet rakyat dilakukan dengan cara *merger* konsentrasi yang dibiayai oleh Bank Dunia. Dimana terjadi penggabungan manajemen teknologi, proses produksi, dan pemasaran. Pembaharuan terhadap lembaga konversi dengan ketentuan biaya pada tahun pertama bersifat hibah dan tahun selanjutnya merupakan kredit komersial pengembangan penanaman karet baru yang pada tahun 1994-1998 telah mencapai luas 65.000 ha. Begitu juga dengan proyek *Tree Crops Smallholder Sector Project* (TCSSP) berhasil mengembangkan kebun karet rakyat yang dibiayai oleh Bank Pembangunan Asia seluas 73.000 ha.²⁷

²⁶ Dika Ardilla Sangi, Evy Maharani dan Susy Edwina, *Analisis Perbandingan Pendapatan Petani Karet Pola ex SRDP Dengan Petani Karet Pola Swadaya di Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi*, Fakultas Pertanian Universitas Riau, diakses dalam <https://adoc.tips/dika-ardilla-sangi-evy-maharani-susy-edwina-fakultas-pertani.html> (18/07/2020, 05.51 WIB)

²⁷ Prita Andika Zohrah, Yusmini, Susy Edwina, *Analisis Kelayakan Finansial Usaha Perkebunan Karet Program Eks UPP TCSDP Di Desa Koto Damai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar*, Jom Faperta Vol. 3 No. 2 (Oktober 2016), Riau: Fakultas Agribisnis Universitas Riau, Hal. 2., diakses dalam <https://www.neliti.com/publications/186706/analisis-kelayakan-finansial-usaha-perkebunan-karet-program-eks-upp-tcsdp-di-des> (18/07/2020, 06.19 WIB)

Ketiga, Pola Bantuan Parsial merupakan program pemberian bantuan kepada petani secara gratis untuk kegiatan pembangunan perkebunan.²⁸ Pola ini dilaksanakan pada wilayah yang berada di luar PIR dan UPP. Pola Bantuan Parsial terdiri dari Proyek Peningkatan Produksi Perkebunan Unit Pengelohan Hasil (P4UPH) dan Proyek Penanganan Wilayah Khusus (P2WK). P4UPH merupakan kegiatan untuk meningkatkan mutu boka. Melalui proyek P4UPH pada tahun 1993 telah berhasil membantu 880 unit pengolahan karet berupa unit *hand mangel*. Proyek P2WK merupakan kegiatan pengembangan tanaman perkebunan dalam suatu skala ekonomis melalui bantuan gratis paket saprodi tanaman karet dan tanaman sela pada tahun pertama dan tahun berikutnya swadaya petani. Pola swadaya berbantuan tersebut sudah dilaksanakan di Sumatera Selatan pada tahun 1993 seluas 32.106 ha dengan jumlah petani sebanyak 32.106 kepala keluarga.

Salah satu bentuk Pola Bantuan Parsial lainnya yaitu sistem usaha rayonisasi. Dimana pada sistem ini terdapat hubungan kerjasama usaha antara kelembagaan petani karet dengan perusahaan pengolah atau eksportir berdasarkan prinsip saling membutuhkan, menguntungkan, kesetiaan dan penerapan etika bisnis yang baik.²⁹

Keempat, Pola Pengembangan Perkebunan Besar (PPB) adalah sistem pengembangan perkebunan yang ditujukan kepada para pengusaha baik dalam membangun kebun sendiri maupun sebagai inti dari pengembangan PIR.

²⁸ Ibid.

²⁹ Ibid.

Pengembangan perkebunan besar melalui fasilitas Kredit Likuidasi Bank Indonesia (KLBI), Paket Deregulasi Januari 1990 (Pakjan 1990) dengan kredit bunga komersial dan Paket Juli 1992, melalui investasi *joint venture* dengan perusahaan asing.³⁰

Dana Sumbangan Wajib Eksportir (Kepres RI No. 301 tahun 1968) ditujukan untuk penelitian dan pengembangan komoditi karet. Kemudian pada tahun 1979 terdapat Dana Tanaman Ekspor (DTE) yang ditujukan untuk *overhead* pembangunan sektor perkebunan dan setelah DTE ditiadakan maka dilanjutkan dengan pendanaan Kredit Investasi Kecil (KIK) yang sangat terbatas dan tidak diberi subsidi.³¹ Perkembangan peremajaan karet sejak diberlakukan paket deregulasi Januari 1990 dengan kredit bunga komersial disalurkan melalui dana kredit investasi kecil (KIK) yang sangat terbatas dan tidak diberikan subsidi. Oleh karena itu pengembangan peremajaan kebun karet sejak saat itu pada umumnya dilakukan secara swadaya petani baik secara bertahap maupun sekaligus.

Indonesia merupakan salah satu negara agraris di dunia dimana masyarakatnya sebagian besarnya hidup dari pertanian dan perkebunan. Besarnya industri pertanian yang ada di Indonesia dapat dilihat dari besarnya kepemilikan masyarakat terhadap perkebunan karet itu sendiri dimana 85% perkebunan karet alam Indonesia dikelola dan dimiliki langsung oleh masyarakat, 8% dimiliki oleh pemerintah dan sisanya 7% dimiliki oleh perusahaan perkebunan swasta. Data ini

³⁰ Ibid.

³¹ Daniel Pakuwali, *Petani Karet Makin Menderita*, medanbisnisdaily.com, diakses dalam <https://medanbisnisdaily.com/news/read/2015/06/08/168074/petani-karet-makin-menderita/> (19/07/2020, 00.48 WIB)

jelas membuktikan bahwa komoditas pertanian memiliki peran penting terhadap perekonomian negara, bahkan indonesia menempati urutan kedua sebagai produsen dan eksportir karet alam di dunia. Menurut data BPS pada tahun 2014-2018 volume dan nilai ekspor karet alam indonesia terus mengalami peningkatan tajam, bahkan hingga 70% dengan dari nilai ekspor 31,2 ribu ton menjadi 53,2 ribu ton hanya dalam waktu empat tahunan saja. Hal ini tentu tidak terlepas dari usaha dan kinerja keras para petani karet alam yang terus menjaga kualitas agar standar karet alam indonesia selalu diminati pasar dan tembus di pasar karet alam dunia.³²

2.2 Luas Area Perkebunan Karet Alam Indonesia

Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa perkebunan karet di Indonesia dibedakan menjadi beberapa kategori berdasarkan status pengusaannya yaitu perkebunan besar dan perkebunan rakyat. Adapun perkebunan besar terbagi menjadi dua kategori perkebunan besar milik negara dan perkebunan besar milik swasta. Luas area perkebunan milik negara tercatat sebanyak 230,65 ha di tahun 2016, mengalami peningkatan sebanyak 1,06 persen menjadi 233,09 ha pada tahun 2017. Kemudian luas area menjadi 189,57 ha, mengalami penurunan sebesar 18,67 persen pada tahun 2018. Adapun luas area perkebunan milik swasta pada tahun 2016 terdata sebesar 316,03 ha, mengalami

³² Redaksi Warta Ekonomi Online, Ekspor Karet Meningkat Tajam, Indonesia Produsen Terbesar Kedua di Dunia, Warta Ekonomi, Diakses dalam <https://www.wartaekonomi.co.id/read242767/ekspor-karet-meningkat-tajam-indonesia-produsen-terbesar-kedua-di-dunia.html> (18/01/2020, 00.18 WIB)

peningkatan di tahun 2017 dari 2,12 persen menjadi 332,73 ha. Pada tahun 2018, luas area menjadi 245,06 ha atau mengalami penurunan sebesar 23,76 persen.³³

Adapun data luas area perkebunan milik rakyat di Indonesia berdasarkan data dari Dirjen Perkebunan, Kementerian Pertanian dilihat dari perkembangannya dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2016-2018) cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, luas area perkebunan rakyat sebesar 3092,36 ha, mengalami peningkatan 0,35 persen atau menjadi 3103,27 ha. Kemudian di tahun 2017 dan tahun 2018 mengalami peningkatan sekitar 0,33% menjadi 3113,42 ha.³⁴

Hampir di sebagian provinsi Indonesia perkebunan karet negara, swasta, dan perkebunan rakyat tersebar diantaranya di Pulau Sumatera dan Kalimantan, Provinsi Jawa Barat, Jawa tengah, Jawa Timur, Banten, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Bali, dan Maluku. Perkebunan milik negara terluas di Indonesia adalah provinsi Sumatera Utara yaitu 68,49 ribu hektar atau 29,38% dari total keseluruhan areal perkebunan milik karet di Indonesia tahun 2017 dan pada tahun 2018 menurun menjadi 39,74 ribu hektar atau 20,96 persen dari total luas area perkebunan milik negara. Luas area perkebunan milik swasta terluas di Indonesia adalah provinsi Sumatera Utara yaitu 106,74 ribu hektar atau 33,07 persen dari total luas area perkebunan karet swasta di Indonesia tahun 2017 dan pada tahun 2018 menurun menjadi 82,47 ribu hektar atau 33,52 persen dari total luas area

³³ BPS, 2018, Statistik Karet Indonesia 2018, diakses dalam <https://www.bps.go.id/publication/2019/11/22/c73bdba12c1f122edae18a29/statistik-karet-indonesia-2018.html> (18/01/2020, 00.45 WIB)

³⁴ Ibid.,

perkebunan swasta. Luas area perkebunan rakyat terbesar di Indonesia adalah provinsi Sumatera Selatan yaitu 787,9 ribu hektar (25,39 %) pada tahun 2017 dari total luas areal perkebunan karet di Indonesia dan pada tahun 2018 diperkirakan sebesar 788,77 ribu hektar (25,33 %) dari luas areal perkebunan karet nasional.³⁵

Indonesia dikenal sebagai produsen karet terbesar kedua di dunia yang jumlah suplai karetnya berperan penting untuk pasar global. Sejak tahun 1980an, industri karet Indonesia telah mengalami pertumbuhan produksi yang stabil. Kebanyakan hasil produksi karet Indonesia diproduksi oleh petani kecil yang mencapai sekitar 80%. Oleh karenanya, perkebunan Pemerintah dan swasta memiliki peran yang kecil dalam industri karet domestik. Kebanyakan produksi karet Indonesia berasal dari provinsi-provinsi seperti Sumatra Selatan, Sumatra Utara, Riau, Jambi, dan Kalimantan Barat.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian, produksi karet nasional pada 2018 mencapai 3,63 juta ton (angka sementara) turun 1,36% dibandingkan tahun sebelumnya. Provinsi penghasil karet terbesar adalah Sumatera Selatan, yang menghasilkan 982.000 ton atau sekitar 27% dari total produksi karet nasional.³⁶

Indonesia memiliki level produktivitas per hektar yang rendah dibandingkan dengan negara-negara kompetitor penghasil karet lainnya. Hal ini disebabkan oleh usia pohon-pohon karet di Indonesia yang pada umumnya sudah tua, disertai kemampuan investasi yang rendah dari para petani kecil, sehingga

³⁵ Ibid.,

³⁶ Indonesia-Investments, *Karet (Alam)*, diakses dalam <https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/karet/item185?> (19/07/2020 01.01 WIB)

mengurangi hasil panen. Sementara Thailand memproduksi 1.800 kilogram (kg) karet per hektar per tahun, Indonesia hanya berhasil memproduksi 1.080 kg/ha. Baik Vietnam (1.720 kg/ha) maupun Malaysia (1.510 kg/ha) memiliki produktivitas karet yang lebih tinggi.³⁷

2.3 Perkembangan Karet Sebagai Komoditas Ekspor

Perkembangan teknologi mendorong kebutuhan manusia terhadap karet yang memiliki sifat sintetis dan fleksibel. Seperti peningkatan produksi otomotif yang diikuti oleh peningkatan permintaan karet alam yang dipergunakan sebagai bahan dasar ban. Ban menjadi komponen utama pada mobil yang merupakan bagian dari hasil perkembangan teknologi dan sudah menjadi kebutuhan masyarakat masa kini. Potensi dan nilai ekonomi karet diprediksi akan terus meningkat sejalan dengan terus meningkatnya perkembangan teknologi dan modernisasi.³⁸ Hal ini tentu akan sangat menguntungkan bagi negara-negara produsen seperti Kawasan asia tenggara yang memiliki iklim tropis yang sesuai dengan asal muasal tanaman karet yaitu brasil. Bagi negara-negara maju dimana industri otomotif berkembang tentu akan menjadi negara tujuan eksport strategis bagi negara-negara produsen karet alam, terlebih lagi jika hilirisasi karet dapat dilakukan secara maksimal seperti mengeksport jenis karet setengah jadi dengan nilai lebih tinggi.

³⁷ Ibid.,

³⁸ Loni T, *Permintaan Karet Alam Diperkirakan Meningkat di 2020*, Vibiznews.com, diakses dalam <https://www.vibiznews.com/2020/01/08/permintaan-karet-alam-diperkirakan-meningkat-di-2020/> (02/03/2020, 16:51 WIB)

Produsen dan pedagang pada dasarnya menginginkan jenis barang dengan kualitas dan harga yang bagus pula. Kualitas dapat dijaga dengan terus melakukan kontrol kualitas secara berkala. Sedangkan harga yang bagus didapatkan dengan ongkos yang minimal tentunya. Begitu pula bagi para produsen yang memproduksi berbagai produk yang terbuat dari karet tentu menginginkan standar produk dengan kualitas yang sama namun dengan ongkos produksi yang minimal. Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan membangun pabrik produksi yang dekat dengan sumberdaya yang ada seperti menempatkan pabrik ban merek terkenal di negara Indonesia agar dapat menghasilkan kualitas ban yang bagus dari bahan karet alam dan harga yang bagus dengan ongkos produksi yang minimal.

Berdasarkan jenisnya ada dua jenis utama karet, yaitu karet alami dan karet sintetis. Jenis pertama dibuat dari lateks yang berasal 'secara alami' dari pohon karet, sedangkan yang kedua karet sintetis dari bahan kimia yang bersumber dari penyulingan minyak bumi. Hampir 60 % karet digunakan oleh industri manufaktur ban dunia dan sisanya digunakan untuk produk umum. Ribuan produk dihasilkan oleh sector ini seperti untuk keperluan transportasi, konstruksi, kesehatan, pertambangan dan lain-lain.³⁹

Bagi negara-negara produsen karet alam seperti Indonesia, Thailand, Malaysia dan Vietnam, industri karet alam menjadi salah satu komoditas yang sangat diandalkan. Hal ini karena letak geografis negara-negara yang berada di Asia Tenggara yang memiliki suhu tinggi 26-32 derajat Celsius dan

³⁹ *Story of Rubber*, International Rubber Study Group, diakses dalam <http://www.rubberstudy.com/storyofrubber.aspx> (11/01/2020, 00.32 WIB)

lingkungannya yang lembab sehingga cocok untuk tumbuhan tanaman karet. Tidak heran jika hampir 70% karet alam dunia diproduksi oleh negara-negara yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia.⁴⁰

	2014	2015	2016	2017	2018 ¹	2019 ¹
Produksi (juta ton)	3.18	3.11	3.2	3.6	3.7	3.8
Volume Ekspor (juta ton)	2.62	2.63	2.58			
Nilai Ekspor (juta Dollar AS)	4.74	3.70	3.37			

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Produksi (juta ton)	2.75	2.44	2.73	3.09	3.04	3.20
Volume Ekspor (juta ton)	2.30	1.99	2.20	2.55	2.80	2.70
Nilai Ekspor (juta Dollar AS)	n.a.	n.a.	7.33	11.76	7.86	6.91

Gambar 2. 1 Produksi dan Ekspor Karet Alam dari Tahun ke Tahun

Hasil keseluruhan ekspor karet alam sebelas tahun terakhir cenderung mengalami fluktuasi, berkisar antar 13,25 persen hingga 18,05 persen. Pada tahun 2008 total berat ekspor mencapai 2,3 juta ton dengan total nilai sebesar US\$ 6,06 milyar, meningkat menjadi 2,81 juta ton pada tahun 2018 dengan total nilai sebesar US\$ 3,95 milyar.

Sebagian besar hasil produksi karet alam Indonesia diekspor ke mancanegara dan sisanya dipasarkan di dalam negeri. Ekspor karet alam Indonesia mencakup lima benua yaitu Asia, Afrika, Australia, Amerika, dan

⁴⁰ *Karet (alam)*, indonesia-investment, diakses dalam <https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/karet/item185> (11/01/2020, 00.04 WIB)

Eropa dengan pangsa utama di Asia. Pada tahun 2018, lima besar negara pengimpor karet alam Indonesia adalah United States, Japan, China, India, dan Korea. Berat ekspor ke United States mencapai 605,97 ribu ton atau 21,54 persen dari total berat ekspor karet alam Indonesia dengan nilai US\$ 848,54 juta. Peringkat kedua adalah Japan, dengan berat ekspor sebesar 483,72 ribu ton atau 17,2 persen dari total berat karet alam Indonesia dengan nilai US\$ 677,28 juta. Peringkat ketiga adalah India, dengan berat ekspor sebesar 302,85 ribu ton atau 10,77 persen dari total berat ekspor karet alam Indonesia dengan nilai US\$ 429,23 juta. Peringkat keempat adalah China dengan berat ekspor 252,02 ribu ton atau sekitar 8,96 persen dari total berat ekspor karet alam Indonesia dengan nilai US\$ 353,94 juta. Peringkat kelima adalah Korea dengan berat ekspor 189,54 ribu ton atau 6,74 persen dari total berat ekspor karet alam dengan nilai US\$ 263,92 juta⁴¹

Tabel 2. 1 Tujuan ekspor karet Indonesia (diolah oleh penulis)

Negara Tujuan	Berat Ekspor (ton)	Nilai (US\$)
Amerika Serikat	605,97	848,54 juta
Jepang	483,72	677,28 juta
India	302,85	429,23 juta
China	252,02	353,94 juta
Korea	189,54	263,92 juta

⁴¹ Ibid.,

Perindustriaan hilir karet Indonesia masih belum banyak dikembangkan. Negara Indonesia saat ini masih bergantung pada impor produk-produk karet olahan karena kurangnya fasilitas pengolahan-pengolahan domestik dan kurangnya industri manufaktur yang berkembang baik. Rendahnya konsumsi karet domestik menjadi penyebab Indonesia melakukan ekspor jumlah besar sekitar 85 persen dari hasil produksi karetnya. Kendati demikian, meski terbilang lambat di beberapa tahun terakhir tampak terjadi adanya perubahan karena jumlah ekspor sedikit menurun akibat meningkatnya konsumsi domestik. Sekitar setengah dari karet alam yang diserap secara domestik digunakan oleh industri manufaktur ban, diikuti oleh sarung tangan karet, benang karet, alas kaki, ban vulkanisir, sarung tangan medis dan alat-alat lain.

Perkembangan pasar karet alam bagi produsen dalam kurun waktu tiga tahun terakhir relative kondusif. Hal ini ditunjukkan oleh peningkatan harga yang relatif tinggi. Kendati demikian, hal tersebut dikarenakan permintaan yang terus meningkat, terutama dari China, India, Brazil dan negara-negara yang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Asia-Pasifik. Menurut IRSG, dalam studi *Rubber* diperkirakan akan terjadi kekurangan pasokan karet alam dalam dua dekade ke depan.

Sebagai bentuk antisipasi dalam menghadapi krisis kekurangan karet alam yang akan terjadi, diperlukan suatu inovasi baru dari hasil industri karet dengan mengembangkan nilai tambah yang bisa di peroleh dari produk karet itu sendiri. Nilai tambah produk karet dapat diperoleh melalui pengembangan industri hilir

dan pemanfaatan kayu karet sebagai bahan baku industri kayu. Menunjuk dari pohon industri berbasis karet.

Terlihat bahwa cukup banyak ragam produk yang dapat dihasilkan dari karet, namun sampai saat ini potensi kayu karet tua belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Pemanfaatan kayu karet merupakan peluang baru untuk meningkatkan margin keuntungan dalam industri karet. Faktanya tidak hanya getah karet saja yang diminati oleh konsumen tetapi kayu karet sebenarnya juga banyak diminati oleh konsumen baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Karenanya warnanya yang cerah dan coraknya seperti kayu ramin.

Selain itu, kayu karet juga merupakan salah satu kayu tropis yang memenuhi persyaratan ekolabeling karena komoditi ini dibudidayakan atau *renewable* dengan kegunaan yang cukup luas, yaitu sebagai bahan baku perabotan rumah tangga, *particle board*, *parquet*, *MDF (Medium Density Fibreboard)* dan lain sebagainya. Oleh karena itu, industri karet pada saat ini bukan hanya berorientasi untuk produksi getah karet tetapi juga untuk produksi biji dan kayu karet.

Produk utama dari pohon karet adalah lateks, lateks yang dapat diperdagangkan oleh masyarakat berupa latek segar, *slab* atau *koagulasi*, sit asap atau sit angin. Hasil dari produk lateks tadi merupakan bahan baku *Crumb Rubber* atau karet remah yang menghasilkan bahan baku untuk berbagai industri hilir seperti ban, sepatu karet, sarung tangan, dan lain sebagainya.

Produk lain dari pohon karet adalah kayu karet itu sendiri yang dapat berasal dari kegiatan rehabilitasi kebun ataupun peremajaan kebun karet tua yang sudah tidak menghasilkan lateks lagi. Kayu karet dapat dipergunakan sebagai bahan bangunan rumah, kayu api, arang, ataupun kayu gergajian untuk alat rumah tangga atau *furniture*. Pemanfaatan kayu karet yang bersumber dari peremajaan kebun karet tua dapat dilaksanakan bersamaan atau terkait dengan program penanaman tanaman hutan seperti kayu sengon atau akasia sebagai bahan pembuatan kertas.

Sebagai salah satu komoditi industri, produksi karet sangat tergantung pada teknologi dan manajemen yang diterapkan dalam sistem dan proses produksinya. Produk industri karet perlu disesuaikan dengan kebutuhan pasar yang senantiasa berubah. Status industri karet Indonesia akan berubah dari pemasok bahan mentah menjadi pemasok barang jadi atau setengah jadi yang bernilai tambah lebih tinggi dengan melakukan pengolahan lebih lanjut dari hasil karet. Hal ini tentunya memerlukan dukungan teknologi industri yang lengkap, yang mana diperoleh melalui kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi. Indonesia dalam hal ini telah memiliki lembaga penelitian karet yang menyediakan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi di bidang perkaretan.

Karet adalah tanaman getah yang memiliki banyak kegunaan dengan sifat elastisitasnya. Karet atau nama alamiahnya (*Havea Brazilensis*) yang sering ditemukan di Indonesia berasal dari Amerika bagian selatan, lebih tepatnya Brazil. Karet dibawa ke Indonesia pada abad ke-18 oleh orang Inggris. Sebelum menyebar keseluruh wilayah Indonesia, karet pada awalnya dibudidayakan di

Sumatera utara. Pada tahun 1902 karet dikembangkan secara luas di pulau Sumatera yang kemudian pada tahun 1906 di pulau Jawa. Belanda tertarik untuk membudidayakan karet alam memiliki nilai harga yang melambung tinggi. Hal ini searah dengan terus meningkatnya pasar otomotif yang salah satu elemen utamanya adalah ban yang terbuat dari karet.⁴²

Perkebunan karet alam di Indonesia pada tahun 1937 mencapai puncak kejayaannya, dimana pada tahun tersebut Indonesia masih masuk pada zaman pra kemerdekaan. Pada waktu itu produksi karet alam Indonesia mencapai 650.00 ton. Namun harga karet setelah itu mengalami penurunan dikarenakan harga karet alam dunia. Kemudian pasca perang dunia II Indonesia kembali menguasai pasar karet alam. Namun pada tahun 1959-1960, Indonesia dikalahkan oleh Malaysia dikarenakan pengelolaan yang kurang baik. Perkebunan karet alam Indonesia 85% nya merupakan perkebunan milik rakyat, 7% perkebunan besar negara, dan 8% sisanya adalah perkebunan milik perusahaan swasta. Besarnya jumlah lahan yang dimiliki oleh rakyat menjadikan produksi karet alam Indonesia bergantung pada produksi karet rakyat. Hal ini menjadikan karet sebagai salah satu usaha perkebunan yang memberikan sumbangsih besar terhadap perekonomian petani dan masyarakat sekitar, namun menjadi susah bagi pemerintah untuk menjalankan proses peremajaan bagi karet-karet yang sudah tua dan tidak produktif lagi, karena tidak mungkin bagi masyarakat untuk menebang lahan karet mereka dan menanam kembali karet yang baru dimana tindakan tersebut membutuhkan waktu

⁴² Sekretariat Jendral, Gambaran Sekilas Industri Karet, Departemen Perindustrian, diakses dalam <https://www.kemenperin.go.id/download/288/Paket-Informasi-Komoditi-Karet> (19/07/2020, 01.43 WIB)

yang sangat lama hingga karet siap produksi kembali. Sedangkan bagi beberapa daerah, lahan karet yang ada adalah sumber utama bagi mata pencaharian mereka.

2.4 Sejarah dan Tujuan Terbentuknya ITRC (International Tripartiter Rubber Council)

ITRC adalah organisasi yang telah berdiri sejak tahun 2001 melalui Joint Declaration di Bali yang diikuti oleh tiga negara anggota yaitu Thailand, Indonesia dan Malaysia yang merupakan tiga negara produsen karet alam dunia.⁴³ Dalam implementasinya ITRC berusaha untuk menjaga stabilitas harga karet alam melalui tiga skema yaitu Strategi jangka pendek *Agreed Export Tonage System (AETS)* yaitu pengurangan dan pembatasan jumlah ekspor karet alam di pasar dunia. Kedua, strategi jangka menengah *Demand Promotion Scheme (DPS)* yaitu peningkatan konsumsi karet alam dalam negeri. Ketiga, strategi jangka Panjang *Supply Management Scheme (SMS)* yaitu peremajaan perkebunan karet atau replanting guna menjaga produktifitas perkebunan karet alam.⁴⁴

Sebelum berdirinya ITRC ada beberapa organisasi karet internasional yang telah berdiri sebagaimana pada tahun 1979 didirikan organisasi karet internasional yaitu *International Natural Rubber Agreement* dimana berkumpul tujuh negara anggota produsen karet alam dunia dan dua puluh lima anggota negara pengimpor karet alam dunia dimana 95% industri karet global didominasi

⁴³ Chairil Anwar, *The Rule International The Tripartite Rubber Council (ITRC) In Stabilizing NR Price*, diakses dalam <http://ejournal.puslitkaret.co.id/index.php/proc/article/view/516> (19/07/2020, 06.04 WIB)

⁴⁴ *Gatracom*, Harga Karet Alam Rendah Ini Strategi Pemerintah, 26 Februari 2019, diakses dalam <https://www.gatra.com/detail/news/394134-Harga-Karet-Alam-Rendah-Ini-Strategi-Pemerintah> (30/04/2019/00:20 WIB)

oleh tujuh negara yang meliputi Indonesia, Thailand, Malaysia, Vietnam, Laos, Singapura, Papua Nugini.⁴⁵

Kebijakan mengenai karet nasional lebih banyak dipengaruhi oleh kebijakan luar negeri dibanding kebijakan dalam negeri, hal ini dikarenakan hampir sebagian besar karet alam Indonesia masuk dalam pasar internasional melalui ekspor karet di beberapa negara tujuan seperti Amerika, Jepang, Tiongkok, India dan beberapa negara lainnya.⁴⁶ Harga karet alam yang bersifat fluktuatif menjadi masalah utama bagi para pelaku usaha karet, terlebih lagi bagi para produsen karet alam di kalangan masyarakat.

ITRC yang terdiri dari Thailand, Indonesia dan Malaysia mendirikan perusahaan patungan yaitu *International Rubber Consortium Limited* (IRCo) yang berkantor pusat di Bangkok, Thailand. IRCo didirikan berdasarkan *Memorandum of Understanding* ITRC pada tahun 2002 di Bali. IRCo juga berfungsi sebagai sekretariat bagi ITRC. *Strategic Market Operation* (SMO) atau Operasi pasar dengan cara membeli, menjual dan mengatur akan kelebihan pasokan karet alam

⁴⁵ Arndt-Corden Department Of Economics, *The Natural Rubber Cartel of Indonesia, Malaysia and Thailand: Its Impacts on the Global Supply and Indonesia's Rubber Market*, Australian National University, diakses dalam <https://crawford.anu.edu.au/news-events/events/1372/natural-rubber-cartel-indonesia-malaysia-and-thailand-its-impacts-global> (19/07/2020, 06.34 WIB)

⁴⁶ Volume ekspor karet ke 10 negara tujuan utama (2016), *Inilah 10 Negara Utama Tujuan Ekspor Karet Indonesia*, databoks.katadata.co.id, diakses dalam <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/11/30/inilah-10-negara-utama-tujuan-ekspor-karet-indonesia> (11/01/2020, 10.22 WIB)

menjadi instrument yang melengkapi Langkah kebijakan ITRC terkait pembatasan ekspor karet alam dan dalam memaksimalkan penyerapan karet domestic.⁴⁷

Sebagai perusahaan gabungan dari tiga negara anggota IRCo didirikan dengan fungsinya sebagai eksekutor untuk menjalankan program yang dimiliki oleh ITRC, Sedangkan untuk dalam negeri, Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (GAPKINDO) dipercaya sebagai National Tripartite Tubber Council atau NTRC yang bertugas untuk menjalankan dan mengatur ekspor dan industri karet alam di Indonesia. Dengan demikian setiap eksportir karet alam juga dan harus menjadi bagian dari GAPKINDO. Sesuai dengan ketentuan dari ITRC, Gapkindo telah menetapkan harga karet terendah di harga 1,35 USDollar Per kg bagi para anggotanya. Menteri perdagangan juga mempertegas peraturan ini dengan mengeluarkan kebijakan no. 10/M-DAG/PER/4/2008 mengenai Standard Indonesian Rubber (SIR) atau ketentuan Karet Alam Spesifik Teknis Indonesia yang diperbolehkan diperdagangkan diluar negeri.⁴⁸ Pasal 5 dalam peraturan tersebut bahwa setiap eksportir karet alam harus memiliki surat lampiran yang menjelaskan posisinya sebagai negara anggota Gapkindo. Dengan kebijakan tersebut kementerian mengharapkan Karet Alam Spesifik Teknis Indonesia menjadi standar produk karet siap ekspor yang bersaing di pasar global. Kendati demikian tidak semua eksportir Indonesia sudah bergabung dalam Gapkindo, sehingga hal ini masih menjadi penghalang untuk mencapai stabilitas harga dalam

⁴⁷ IRCO, International Rubber Consortium Limited (IRCo), Kementerian Perdagangan, diakses dalam <http://ditjenppi.kemendag.go.id/index.php/apec-oi/organisasi-komoditi-internasional/irco> (11/01/2020, 12.16 WIB)

⁴⁸ Vagha Julivanto, *Dinamika Ekspor Karet Alam Indonesia*, Skripsi, Bogor: Jurusan Ilmi Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Hal. 47.

komoditas karet alam, seharusnya ada kerjasama yang lebih baik lagi antara pemerintah Indonesia dan Gapkindo akan tercapai nilai harga karet yang diinginkan Bersama.⁴⁹

Gapkindo sebagai gabungan antar pengusaha karet yang sebagian besarnya adalah pihak swasta diwajibkan oleh ITRC untuk turut berpartisipasi dalam IRCo, agar dapat membantu pemerintah memberikan masukan maupun backup terhadap perundingan-perundingan yang dilakukan oleh ITRC karena dianggap lebih mengerti mengenai hal-hal dalam industry karet sekaligus menjadi mitra utama pemerintah dalam beberapa Committee yang diantaranya:

1. Committee of Cost Production: Gapkindo bertugas dalam mengkaji harga referensi yang rasional atau harga wajar dan aman sehingga harga referensi masih masuk pada level atas COP
2. Committee on Economy and Statistics: Bertugas untuk mengkaji dan proyeksi produksi terhadap setiap negara-negara anggota untuk jangka pendek dan jangka Panjang serta menganalisa pertumbuhan permintaan karet alam dunia sebagai strategi dalam melihat pasar dan setiap negara yang memiliki produksi berlebihan diberikan peringatan agar tidak mempengaruhi pergerakan pasar karet alam karena kelebihan suplai dan produksi.
3. Committee on Strategic Market Operation: Bertugas untuk menganalisa faktor naik dan turunnya pasar yang mempengaruhi terhadap harga karet alam. Hasil Analisa akan disampaikan kepada

⁴⁹ *Ibid.*

negara-negara anggota yang digunakan sebagai informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan kebijakan-kebijakan oleh para stake holder guna mengabil kebijakan-kebijakan strategis dalam industry karet alam.

ITRC menjalankan fungsinya sebagai organisasi yang mengakomodir kepentingan produsen karet alam ketiga negara anggota mewajibkan setiap pelaku usaha karet untuk berpartisipasi dalam IRCo yaitu perusahaan patungan non profit ketiga negara dalam menjalankan fungsinya. Dan Gapkindo sebagai NTRC pemerintah Indonesia menjalankan fungsinya melalui berbagai komite diantaranya:⁵⁰

- a. *Committee on Cost Production*: Bertugas untuk mengkaji harga refrensi yang rasional guna menjaga harga karet pada level diatas dari ongkos produksi yang tetap menguntungkan.
- b. *Committee on Economy and Statistic*: Melakukan kajian dan proyeksi guna memantau produksi karet alam setiap negara anggotanya, baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka Panjang. Sehingga setiap negara akan mendapatkan peringatan jika terdapat kelebihan maupun kekurangan produksi yang mempengaruhi pergerakan harga di pasar karet internasional.
- c. *Committee on Strategix Market Operation*: Bertugas untuk memantau pasar karet alam internasional. Mempelajari dan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi naik dan turunnya harga karet alam. hasil analisi

⁵⁰ Ibid.

tersebut akan disebarluskan kesetiap anggota dan kemudian kepada para pengusaha karet serta kepada para pemangku kebijakan sehingga dapat menentukan arah yang baik dalam industry karet alam di masing-masing negara.

ITRC (International Tripartite Rubber Council) didirikan berdasarkan kesepakatan tiga negara produsen karet alam utama yaitu Thailand, Indonesia dan Malaysia. Ketiga negara sepakat untuk melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan para petani karet alam di negara masing-masing yaitu dengan menjaga stabilitas harga karet alam di pasar internasional. Dalam upaya ini ketiga negara menggunakan tiga skema yaitu:⁵¹

1. *Supply Management Scheme (SMS)*: yaitu skema jangka Panjang dalam pengendalian produksi di hulu atau tingkat petani dengan cara penanaman ulan, diversifikasi bisnis, penyerapan karet domestic serta pembatasan pembukaan kebun baru.
2. *Agreed Export Tonnage Scheme (AETS)*: Kesepakatan antar negara anggota ITRC untuk membatasi supply karet pada pasar internasional, khususnya pada saat ketersediaan jumlah karet melebihi permintaan. dengan pembatasan ini maka ketersediaan karet akan berkurang yang berakibat pada kelangkaan sehingga diharapkan dapat meningkat harga

⁵¹ Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, International Tripartite Rubber Council (ITRC), Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, diakses dalam <http://ditjenppi.kemendag.go.id/index.php/apec-oi/organisasi-komoditi-internasional/itrc> (19/07/2020, 02.31 WIB)

karet alam pada harga yang stabil sehingga karet yang ada dapat dilepas kembali ke pasaran. Meski demikian skema ini bagi para pelaku usaha akan menjadi pil pahit dimana berkurangnya profit dikarenakan dikurangnya jumlah penjualan khususnya ekspor karet alam serta pelaku usaha tetap melakukan pembelian secara normal sedangkan barang tidak dijual melainkan ditahan digudang sehingga para pengusaha akan terbebani dengan membayarkan bunga bank yang terus berjalan sedangkan mereka tidak bisa melakukan penjualan normal karena pembatasan tersebut. Skema ini merupakan skema jangka pendek sehingga hanya dilaksanakan dalam jangka waktu yang singkat sekitar tiga hingga empat bulan meskipun tidak menutup kemungkinan akan ada perpanjangan masa sesuai yang dibutuhkan demi tercapainya stabilitas harga karet di pasar internasional. Baru-baru ini skema AETS dilaksanakan pada tahun 2019 yang tertuang pada keputusan Menteri perdagangan (kepmendag) no. 779 tahun 2019 tentang pelaksanaan AETS ke-6 untuk komoditas karet alam. dalam pelaksanaan skema AETS baru-baru ini pemerintah Indonesia, Thailand dan Malaysia sepakat untuk mengurangi jumlah ekspor karet alam sebesar 240.000 ton guna mengembalikan stabilitas harga karet alam di pasar global.⁵²

3. *Demand Promotion Scheme (DPS)*: Skema bertujuan untuk memaksimalkan konsumsi karet dalam negeri sehingga setiap negeri tidak terus menerus bergantung dengan pasar ekspor dan dapan

⁵² CNN Indonesia, *Harga Anjlok, RI, Thailand dan Malaysia Kurangi Ekspor Karet*, diakses dalam <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190401122305-92-382556/harga-anjlok-ri-thailand-dan-malaysia-kurangi-ekspor-karet> (06/02/2020, 00.40 WIB)

mengolah katet menjadi produk dengan nilai lebih tinggi dibandingkan mengekspor bahan mentah yang masih memiliki nilai lebih rendah. Dan skema-skema yang ada juga di dukung dengan kebijakan *Strategic Market Operation* (SMO) dimana ITRC melakukan penyerapan kelebihan pasokan karet alam di pasaran dengan cara membeli kelebihan karet alam yang ada. Dalam pelaksanaannya ITRC kemudian mendirikan perusahaan patungan antar tiga negara *International Rubber Consortium Limited* (IRCo) yang merupakan perusahaan non profit yang berfungsi utama dalam menjalankan keseluruhan kebijakan ITRC termasuk ketiga skema yang ada.

Pada *Memorandum of Understanding* yang ditandatangani oleh ketiga negara anggota mengenai *Rubber Cooperation* menjelaskan bahwa produksi karet di ketiga negara anggota harus berkontribusi secara signifikan terhadap ekonomi nasional masing-masing negara anggota dan juga ekonomi dunia. Singkatnya, IRCo merupakan perusahaan patungan yang didirikan berdasarkan *MoU* yang telah disepakati oleh ketiga negara anggota. Modal utama yang digunakan untuk pembiayaan IRCo dan kegiatannya tidak dapat dikatakan investasi, melainkan sebuah pencapaian kepentingan yang diinginkan bersama. Secara jelasnya fungsi-fungsi dari IRCo adalah sebagai berikut:⁵³

1. Melakukan monitoring harian mengenai ekonomi dan pasar karet global.
2. Melakukan penghitungan harian atau *Daily Composite Price* (DCP) dan pergerakan harga rata-rata dalam 14 hari.

⁵³ Tika Rahmansyah, *Peranan International Tripartite Rubber Council Terhadap Industri Karet Indonesia*, Skripsi, Makassar: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Hasanuddin, Hal. 20.

3. Melakukan pemeliharaan harian di situs www.irco.biz untuk penyebaran informasi dan statistik pasar karet.
4. Mengingatkan anggota terhadap perubahan perkembangan pasar dan harga karet yang signifikan yakni melalui sistem *Alert price*, *Trigger Price*, dan *Reference Price*.
5. Mempersiapkan segala kebutuhan pelaporan, proposal, dan rekomendasi untuk tindakan yang diambil.
6. Melakukan pengawasan, konsolidasi laporan, dan menganalisa efektivitas tindakan yang diambil.
7. Analisis teknik mengenai ekonomi global dan scenario pasar karet serta perkembangan harga pada suatu periode.⁵⁴

Sesuai dengan MoU yang telah disepakati *International Tripartite Rubber Council* pada tanggal 31 Oktober 2008 di Jakarta, dikeluarkan siaran pers yang berjudul ITRC dan IRCO: Sepakat Atasi Penurunan Harga *Natural Rubber*. Siaran pers tersebut disebarkan di Indonesia melalui *website* dari Departemen Perdagangan Republik Indonesia. Pada siaran pers tersebut dijelaskan bahwa disepakati tiga langkah bersama guna mengatasi *tren* penurunan harga karet alam dan diharapkan ketiga langkah tersebut dapat menstabilkan kembali harga karet.⁵⁵

Selain skema kerja di atas, ketiga negara ITRC juga telah sepakat untuk membentuk pasar regional karet (*Regional Rubber Market*) guna memperkuat posisi ketiga negara anggota sebagai produsen karet alam sekaligus mengatasi

⁵⁴ Kementerian Perdagangan, 2015, Perkembangan Diplomasi Karet Indonesia Di Dunia, diakses dalam

<https://www.google.com/search?q=PERKEMBANGAN+DIPLOMASI+KARET+INDONESIA+DI+DUNIA&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b#>

⁵⁵

gejolak harga dengan memiliki pasar karet dalam regional sendiri. Melalui pasar karet regional ini diharapkan komoditas karet alam dapat ikut meramaikan bursa pasar berjangka sebagai penunjang pasar fisik yang telah ada serta dapat menjalankan fungsi lindung nilai harga karet dan dapat membentuk harga riil pasar karet alam.⁵⁶

International Tripartite Rubber Council (ITRC) telah melaksanakan beberapa kali pertemuan pada tahun 2014, di antaranya: Sidang ITRC ke-23 di Chiangmai, Thailand; Pertemuan Demand Promotion Scheme Committee (DPSC); Pertemuan Expert Group on Establishment of a Regional Rubber Market (EGERRM); dan yang terakhir dilaksanakan, yakni pada bulan November 2014 adalah Pertemuan Dewan Menteri ITRC 2014.⁵⁷

Pertemuan Dewan Menteri ini menghasilkan beberapa hal penting untuk ditindaklanjuti. Yang pertama, pada tahun 2015 ITRC memiliki prioritas untuk memonitor jumlah total realisasi ekspor supaya target realisasi ekspor karet alam tahun 2015 tidak melebihi demand. Langkah ini dilakukan untuk menyerap kelebihan supply di pasar karet global. Upaya untuk menjaga keseimbangan supply-demand ini merupakan cara meningkatkan harga karet alam ke tingkat yang remuneratif bagi petani. Yang kedua, para Menteri sepakat agar ketiga negara menindaklanjuti rekomendasi pembentukan pasar karet regional, dimana tiap-tiap negara diharapkan dapat menyelesaikan isu-isu teknis di dalam negeri

⁵⁶ Asnil Bambani Amri, *Harga Karet Naik Usai Ekspor Dibatasi di 3 Negara*, Kontan, diakses dalam <https://industri.kontan.co.id/news/harga-karet-naik-usai-ekspor-dibatasi-di-3-negara> (12/02/2020, 23.08 WIB)

⁵⁷ ITRC Kendalikan Pasokan Karet, *Investordaily*, 27 Februari 2015, diakses dalam <https://investor.id/archive/itrc-kendalikan-pasokan-karet> (19/07/2020, 04.19 WIB)

agar pasar regional dapat terwujud dalam waktu 18 bulan pasca MCM ITRC 2014.

Pembentukan pasar karet regional akan dilakukan secara bertahap dan dimulai dengan pasar fisik di masing-masing negara (Thailand, Indonesia, dan Malaysia). Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam usaha pembentukan ini antara lain harmonisasi mutu, approval pabrik, optimalisasi sistem resi gudang, branding SIR20, dan kontrak karet seperti Shanghai Futures Exchange (SHFE). Pembentukan pasar karet fisik di masing-masing negara ini menguntungkan, baik bagi petani maupun pelaku usaha, karena adanya langkah nyata pembentukan tata niaga karet alam yang lebih baik di masa depan.

